

Keistimewaan DIY Bisa Dirasakan Masyarakat

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, keistimewaan DIY harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Sehingga masyarakat bisa benar-benar mendapatkan manfaat, termasuk pemanfaatan dana keistimewaan (Danais).

"Saya berharap bagaimana keistimewaan DIY ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu sudah saatnya pemerintah, termasuk kabupaten/kota sampai pada level kalurahan harus mengubah pola pikirnya. Karena kalau hanya karena sekadar rutinitas ya tidak akan pernah berubah keadaan. Untuk masyarakat dan kabupaten/kota sampai kalurahan bisa sungguh-sungguh dalam memanfaatkan Danais berikut pertanggungjawabannya," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat dimintai tanggapan tentang evaluasi 9 Tahun Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY, di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/8).

Sultan mengatakan, keberadaan Danais idealnya harus bisa meningkatkan kualitas termasuk bagi para seniman. Karena sebelum adanya Danais dan pendanaan yang dimiliki masih terbatas, mereka sering mendapatkan juara atau penghargaan dalam berbagai festival. Idealnya dengan ada Danais, kondisinya bisa lebih baik sehingga seniman bisa lebih berkualitas lagi.

"*Saiki nek ana* bantuan kabeh mung do njalak danais ning nek pertandingan kalah pie. Tentu hal seperti itu tidak boleh terjadi, karena idealnya dengan adanya Danais, bisa lebih berkualitas. Jadi kalau kita bicara pembinaan, manfaat dan pelestari pengembang ya mestinya jangan sekadar aku duwe duit bual, kamu pentas. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas untuk menjadi lebih baik," terangnya.

* **Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Antara/Andreas Fitri Altmoko

BANCAKAN KEISTIMEWAAN: Warga yang tergabung dalam Forum Warga Yogyakarta menggelar aksi 'Bancakan Keistimewaan' memperingati 9 tahun disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (31/8). Dalam aksi itu mereka menyerukan agar Dana Keistimewaan dialokasikan untuk bantuan sosial tunai bagi pelaku usaha kecil, PKL, dan pekerja informal yang terdampak pandemi.

EMPAT HAKIM MK BERBEDA ALASAN Alih Status Pegawai KPK Konstitusional

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga tetap konstitusional. Putusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmick P Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota.

Namun dalam putusan itu, empat Hakim Konstitusi yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). "Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di gedung MK Jakarta, Selasa (31/8).

Putusan tersebut menjawab gugatan No 34/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Dalam petitumnya, Yusuf Sahide meminta agar MK menyatakan, dua pasal di UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945.

* **Bersambung hal 7 kol 1**

Analisis KR
Sanksi Etik KPK

Dr Agus Riewanto

MUNGKIN publik tidak lagi terkejut. Walau Wakil Ketua KPK Lili Pintauli terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Karena telah menyalahgunakan wewenang sebagai Pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan secara langsung dengan pihak yang perkaranya tengah ditangani. Pihak yang dimaksud adalah Walikota nonaktif Tanjung Balai Sumatera Utara, M Syahrial yang terlibat dalam perkara dugaan suap lelang jabatan. Anehnya, pelanggaran etik hanya diberi sanksi ringan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

* **Bersambung hal 7 kol 1**

Tadwal Salat	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Rabu, 1 September 2021	11:42	15:00	17:41	18:50	04:24

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972**).

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
1039	MGMP Bahasa Inggris SMP		
	Kab. Bantul		2,500,000.00
1040	Hamba Allah		50,000.00
	JUMLAH		Rp 2,550,000.00

s/d 30 Agst 2021 Rp 504,090,000.00
s/d 31 Agst 2021 Rp 506,640,000.00
(Lima ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

(Siapa menyusul?)

PPKM DIY Masih di Level 4 Kian Sedikit RT di Zona Merah

YOGYA (KR) - Tingkatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY belum mengalami penurunan seperti di sejumlah daerah lainnya. Posisi masih di level 4 menjadi tantangan bagi semua pihak, terkait masih fluktuatifnya kasus positif Covid-19 di DIY.

"Kalau masyarakat tidak mau tertib dan mobilitasnya masih tinggi DIY akan kesulitan untuk turun level. Untuk itu saya minta

selain penegakan Prokes, mobilitas terutama di lingkungan pemukiman harus bisa dikendalikan. Karena jika kasusnya masih fluktuatif seperti sekarang, levelnya tidak akan turun-turun. Semua itu akan bisa diwujudkan salah satunya dengan mengurangi mobilitas, jadi *nek ora perlu, tidak perlu nangga*," terang Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/8).

Sementara Sekda DIY Kadar-

manta Baskara Aji menyampaikan DIY masih masuk kategori level 4 atau merah. Sesuai Instruksi Mendagri, disebutkan daerah-daerah aglomerasi yang di sekitarnya masih merah sebaiknya tetap pada level 4. "Bagi kita, tidak ada persoalan DIY masih level 4 dalam rangka lebih mengamankan agar penularan Covid-19 antaraglomerasi tidak terjadi. Toh, sebetulnya problematika lainnya seperti pembukaan perusahaan

tetap bisa ditempuh bagi perusahaan yang mengantongi IOMKI yang memproduksi barang-barang esensial maupun critical diberikan izin yang penting mengikuti prosedur," paparnya.

Baskara Aji menyatakan daerah dengan status level apapun yang penting wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat ini. Selanjutnya, pusat perbelanjaan atau mal di DIY sudah mulai

* **Bersambung hal 7 kol 1**

DIDUGA TERIMA SUAP DARI PARA KADES

KPK Tahan Bupati Probolinggo dan Suami

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan kepala desa (Kades) di lingkungan Pemkab Probolinggo Jatim Tahun 2021. Sebelum melakukan penahanan, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

"Lima tersangka saat ini dilakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai 19 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8).

Kelima tersangka yang ditahan adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK. Selain itu

Hasan Aminuddin (anggota DPR RI) yang juga suami Puput ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK). Tersangka yang ditahan selanjutnya,

Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan Muhammad Ridwan (MR) selaku

ASN/Camat Paiton ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedang Sumarto (SO) selaku ASN/Pejabat Kepala Desa (Kades) Karangren Kecamatan Krejengan ditahan di Rutan

KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

KPK sebelumnya menetapkan 22 orang tersangka. Dalam kasus ini, sebagai penerima suap, yakni Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan dan Muhammad Ridwan. Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN

* **Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) bersama suaminya yang juga Anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.

Bagi yang sedang isoman, tapi ingin konsultasi dokter

DOCCALL
Konsultasi Dokter Melalui Video Call
HOTLINE : 08112854035

RS PKU Bantul
KONSULTASI DOKTER ONLINE
Pendaftaran : 08123 638 678

Lansia sangat rentan terpapar Covid-19.
Kurangi aktivitas di luar, berkegiatan cukup di rumah saja.

DATA KASUS COVID-19 Selasa, 31 Agustus 2021

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 4.089.801 (+10.534)	- Pasien positif : 149.918 (+539)
- Pasien sembuh : 3.760.497 (+16.781)	- Pasien sembuh : 132.776 (+1.127)
- Pasien meninggal : 133.023 (+532)	- Pasien meninggal : 4.849 (+33)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Ria/Ira)

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● SAAT masih menjadi mahasiswa baru di salah satu PTS di Sleman, teman saya ingin mencoba sarapan di warung burjo. Dia memesan ke Aa' penjualnya, "Aa", pesan Slemanan satu." Aa' penjual bingung, karena tidak ada makanan yang namanya Slemanan. Ternyata teman saya mengira kalau ada bakmi Magelangan, yakni bakmi goreng campur nasi, juga ada makanan namanya Slemanan. (Achmad Zaldy BR, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km 14,5 Umbulmartani, Ngemplak Sleman 55584)-d

UNTUK memudahkan pengiriman naskah SST bisa melalui e-mail: www.naskahkr@gmail.com atau WA 0895-6394-11000, ditulis Naskah SST.